

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu - Senin, 20 - 22 Maret 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Sabtu, 20 Maret 2021	Kolam Regulasi Nipa-Nipa Akan Kurangi Risiko Banjir Kota Makassar	Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko, memaparkan metode pengendalian banjir wilayah hilir dilakukan dengan cara mengatur aliran Sungai Tallo. Kolam Regulasi Nipa-Nipa akan menyimpan air untuk sementara waktu selama terjadi puncak banjir melalui pelimpah (spillway) dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo melalui pintu pengatur (metode gravitasi) dan pompa. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4510336/jokowi-kolam-regulasi-nipa-nipa-akan-kurangi-risiko-banjir-kota-makassar
2	Kontan.co,id	Sabtu, 20 Maret 2021	Dongkrak pariwisata di Kabupaten Ngawi, Kementerian PUPR rehabilitasi Benteng Pendem	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merehabilitasi Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi. Aksi bersolek ini demi meningkatkan kinerja sektor pariwisata di daerah tersebut. https://regional.kontan.co.id/news/dongkrak-pariwisata-di-kabupaten-ngawi-kementerian-pupr-rehabilitasi-benteng-pendem https://www.liputan6.com/bisnis/read/4511882/rawat-cagar-budaya-benteng-pendem-direvitalisasi-rp-11376-miliar https://www.merdeka.com/uang/kementerian-pupr-gelontorkan-rp113-miliar-percantik-benteng-pendem-di-ngawi.html https://fin.co.id/2021/03/21/tingkatkan-pariwisata-di-kabupaten-ngawi-kementerian-pupr-rehabilitasi-benteng-pendem/.
3	Kumparan.com	Sabtu, 20 Maret 2021	Fakta-fakta Soal Pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Baru	Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan masterplan memang menjadi kewenangan Bappenas. Namun, ia memastikan pembangunan tersebut baru bisa dimulai kalau Undang-undang Ibu Kota Negara dirampungkan. https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-fakta-soal-pembangunan-istana-presiden-di-ibu-kota-baru-1vOfJK7ux9r/full
4	Solopos.com	Sabtu, 20 Maret 2021	Mengejar Senja Di Lokasi Legenda Siti Nurbaya	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR membangun jalur pejalan kaki, saluran/drainase, sampai Taman Siti Nurbaya. Di lokasi legenda Siti Nurbaya ini ada arena skateboard, tempat sampah,

				WC, lampu taman, gapura, dan jalan lingkungan. Penataan yang menarik itu menjadikan tempat ini asyik dikunjungi khususnya saat sore hari menjelang senja. https://www.solopos.com/menjejar-senja-di-lokasi-legenda-siti-nurbaya-1113277
5	Industry.co.id	Sabtu, 20 Maret 2021	Komisi V Minta Kementerian PUPR Jaga Mutu dan Kualitas Pembangunan UIII	Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tetap menjaga mutu dan kualitas dalam membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). https://www.industry.co.id/read/82492/komisi-v-minta-kementerian-pupr-jaga-mutu-dan-kualitas-pembangunan-uiii
6	Akurat.co	Minggu, 21 Maret 2021	Mitigasi Bencana, PUPR Jalankan 6 Sumur Bor Tenaga Matahari di Mamuju	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menuntaskan pembangunan sumur bor di enam titik. Hal tersebut sebagai upaya mitigasi bencana pasca bencana Gempa Bumi di wilayah Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. https://www.jawapos.com/infrastruktur/20/03/2021/mitigasi-bencana-pupr-jalankan-6-sumur-bor-tenaga-matahari-di-mamuju/ https://www.timesindonesia.co.id/read/news/335388/kementerian-pupr-ri-tuntaskan-pembangunan-enam-titik-sumur-bor-di-mamuju https://akurat.co/ekonomi/id-1287735-read-pupr-tuntaskan-pembangunan-enam-titik-sumur-bor-bertenaga-matahari-di-mamuju
7	Borneo24.com	Minggu, 21 Maret 2021	Kementerian PUPR Jadi Program Unggulan Tahun Anggaran 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk mengembangkan program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dampak Covid-19. Pada tahun anggaran 2021 Kemen-PUPR memperoleh Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. https://borneo24.com/nasional/kementerian-pupr-jadi-program-unggulan-tahun-anggaran-2021

8	Timesindonesia.co.id	Minggu, 21 Maret 2021	Kementerian PUPR RI Serahkan Bantuan PSU 1.816 Unit Rumah di Sulawesi Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus berkomitmen menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau serta nyaman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini salah satunya diwujudkan melalui penyaluran bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Bantuan PSU). https://www.timesindonesia.co.id/read/news/335295/kementerian-pupr-ri-serahkan-bantuan-psu-1816-unit-rumah-di-sulawesi-utara
9	Nusadaily.com	Minggu, 21 Maret 2021	Matangkan Perencanaan, Pasar Kota Batu Digarap Tahun Ini	Pembangunan Pasar Besar Batu besar bakal dimulai tahun ini. Sinyal itu mulai tampak setelah Pemkot Batu bersama Kementerian PUPR membahas dokumen pelaksanaan teknis yang digelar secara virtual beberapa hari lalu. Revitalisasi pasar induk Proyek prestisius ini ditopang dari APBN senilai Rp 200 miliar. https://nusadaily.com/regional/matangkan-perencanaan-pasar-kota-batu-digarap-tahun-ini.html

Judul	PERUMAHAN - Aman di Kediaman	Tanggal	22 Maret 2021
Media	Kompas (Halaman, 9)		
Resume	Terkait hal itu, mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah, sesuai rencana strategis 2020-2024, menargetkan penyediaan 5 juta unit rumah. Rinciannya, sebanyak 900.000 unit merupakan rumah bersubsidi yang dibiayai melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka.		

PERUMAHAN

Aman di Kediaman

Seorang reporter radio pernah menanyakan motivasi YB Mangunwijaya (almarhum) dalam memperjuangkan tempat berteduh, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Romo Mangun menjawab, "Agar mereka bisa mengenal satu kata: pulang." (*Kompas*, 5 Mei 2004)

Sekian tahun berselang, nilai dan semangat Romo Mangun yang merupakan rohaniwan, budayawan, dan arsitek itu tetap relevan dan patut diperjuangkan bersama. Tak terbantahkan, rumah memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia.

Posisi penting rumah terabadikan dalam frasa tiga kebutuhan primer manusia, yakni sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan ketiga hal tersebut menentukan kesejahteraan manusia. Pulang ke rumah adalah idaman yang membahagiakan dan menenteramkan setiap orang.

Namun, faktanya, hingga kini belum semua orang dapat memenuhi kebutuhan hunian tersebut. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2018, ada sekitar 14 juta dari 70 juta rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki rumah. Sebanyak 5,52 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah itu ada di kelompok berpendapatan menengah-atas. Adapun 6,51 juta rumah tangga ada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan 1,96 juta rumah tangga di kelompok miskin.

Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Mereka bukannya tidak mau, melainkan tidak mampu memiliki rumah. Kelompok yang tidak memiliki kecukupan kemampuan daya beli tersebut mesti mendapat uluran tangan agar dapat segera memiliki hunian.

Terkait hal itu, mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah, sesuai rencana strategis 2020-2024, menargetkan penyediaan 5 juta unit rumah. Rinciannya, sebanyak 900.000 unit merupakan rumah bersubsidi yang dibiayai melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka.

Adapun 100.000 unit rumah disediakan dengan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), 500.000 rumah dengan tabungan perumahan rakyat (Tapera), dan 50.000 unit rumah melalui pembiayaan Sarana Multigriya Finansial. Selain itu, sebanyak 3,45 juta unit rumah diadakan melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Melalui program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015, Kementerian PUPR berupaya mengatasi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2020, program ini menuntaskan pembangunan 965.217 unit rumah, yang 772.324 unit di antaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sisanya, sebanyak 192.893 unit, untuk warga selain masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun salah satu cara membantu kelompok masyarakat kelas menengah sekaligus mendorong konsumsi di masa pandemi Covid-19 adalah melonggarkan aturan rasio pinjaman terhadap aset (LTV) bagi masyarakat yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR).

LTV yang dilonggarkan menjadi 100 persen, artinya, uang muka KPR sebesar nol persen dari harga rumah. Namun, ada konsekuensinya, yakni nilai cicilan lebih besar dibandingkan dengan nasabah KPR yang membayar uang muka tertentu, pada periode yang sama.

Di tengah upaya penyediaan rumah dari sisi kuantitas, aspek kualitas bangunan juga layak diperhatikan. Kualitas bangunan merupakan faktor penting karena berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penghuni rumah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Arief Sabaruddin dalam sebuah diskusi secara daring, beberapa waktu lalu, mengilustrasikan, lantai yang indah tidak akan menyelamatkan penghuni. Akan tetapi, rangka baja yang terangkai baik dan tidak terlihat di permukaan yang akan menyelamatkan penghuni rumah tersebut.

Begitu pula campuran cat yang mahal dan indah tidak akan menyelamatkan penghuni, tetapi campuran beton yang baik dan disembunyikan cat yang akan menyelamatkan penghuni.

Ilustrasi itu menunjukkan arti penting struktur tulangan baja dan campuran beton yang tepat dalam menjamin kekuatan bangunan. Unsur-unsur yang substantif dinilai lebih utama dibandingkan dengan aksesoris yang terlihat.

Kembali ke persoalan hak atas rumah, semua warga, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, berhak mendapatkan rumah yang memenuhi persyaratan teknis kelayakan hunian. Aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penghuni mesti dipenuhi pengembang. Saatnya semua pihak bergandeng tangan mewujudkan hunian yang aman. (CANTO SAPTOWALYONO)



Judul	Menerawang Banjir Tanpa Akhir	Tanggal	22 Maret 2021
Media	Kompas (Halaman, 12)		
Resume	"Saya pribadi ingin setiap pemerintah daerah, misalkan Jakarta, memberikan insentif kepada setiap rumah yang bisa membangun sistem menahan hujan, bisa misalnya dengan dikurangi dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)," kata Firdaus Ali, Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air, dalam diskusi daring "Memuliakan Air dan Hutan Kota".		

Menerawang Banjir Tanpa Akhir

Banjir besar di Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta awal tahun ini dinilai akan terus berulang tanpa adanya upaya penanggulangan yang melibatkan warga kota. Isu lama yang kembali disuarakan.

BEKASI, KOMPAS — Banjir seperti tanpa akhir di Jakarta dan Bekasi, yang kembali meneror warga pada awal tahun ini. Lagi-lagi, peran warga kota dinilai signifikan mengurangi dampak. Isu yang sudah mengemuka beberapa tahun lalu.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kerugian yang timbul akibat banjir Februari 2021 sebesar Rp 250 miliar. Namun, itu belum termasuk kerugian di kawasan industri.

"Tahun ini ada salah satu kawasan industri yang juga terdampak banjir. Teridentifikasi di salah satu kawasan industri itu saja kerugiannya hampir Rp 300 miliar," kata anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, dalam diskusi Cikarang Corner bertajuk "Banjir: Kawan atau Lawan" di Hutan Bambu Warbung, Desa Sukadana, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Minggu, (21/3/2021).

Banjir di Kabupaten Bekasi secara periodik sudah terjadi 14 tahun berturut-turut. Dari kejadian berulang itu, katanya, skala bencana beberapa tahun terakhir terus meningkat.

"Dua tahun terakhir, pada 2020, banjir di 18 kecamatan. Tahun ini 15 kecamatan, 35 desa, tersebar di 120 titik dengan warga terdampak 14.845 keluarga," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadir berbicara dalam diskusi di antaranya anggota DPR, Obon Tabroni, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi R Sopyan Rahayu. Lalu, Ketua Komunitas Save Kali Cikarang Eko Jatmiko; pegiat sejarah Bekasi, Shakiran; dan perwakilan kalangan pengusaha Kabupaten Bekasi, Eric Sihotang.



Aliran Sungai Ciliwung di antara bebatuan di kawasan Tebing Gircil, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/3/2021). Aneka sampah dijumpai di area ini, yang di antaranya menjadi sasaran para pemulung. Sungai bersih dan sehat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di tengah kabar banjir yang selalu muncul.

Menurut Obon, pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi, persoalan utamanya bukan pada Sungai Citarum. Sumbangan air dari Citarum hilir, wilayah Kabupaten Bekasi. Proses identifikasi mendetail, mulai dari Kedung Gede atau dari titik pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum—dengan debit air 900 meter kubik per detik.

Ia menilai, pengendalian banjir harus terintegrasi, mulai dari anggaran hingga aturan. "Kalau untuk hari ini, di Citarum ada puluhan titik tanggul kritis," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BBWS

Citarum Anang Muchlis mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis di Citarum hilir, wilayah Kabupaten Bekasi. Proses identifikasi mendetail, mulai dari Kedung Gede atau dari titik pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum sampai Muara Gem-bong.

"Pemeriksaan tanggul yang kami lakukan 93 kilometer. Hasilnya, 55 titik tanggul kritis. Sudah selesai dan ini akan kami tindak lanjuti," kata Anang.

Kesadaran kolektif

Dalam diskusi itu disepakati bahwa penanganan banjir periodik di Bekasi memerlukan kesadaran kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Banjir di Kabupaten Bekasi, menurut Budiyanto, merupakan persoalan sistemik. Banjir berulang dengan skala terus membesar dan berdampak luas serta merugikan masyarakat secara materiil dan imateriil.

"Jadi, tidak bisa solusi penyelesaian banjir di Kabupaten

Bekasi hanya sporadis. Harus menggunakan pendekatan sistemik skala besar," katanya.

Pendekatan sistemik yang dimaksud antara lain mulai dari prioritas anggaran hingga regulasi penanggulangan banjir. Di Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah dianggap tak mampu mengidentifikasi penyebab masalah banjir. Akibatnya, pemerintah daerah tidak berbuat apa pun.

Di tingkat provinsi, anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2021 sebanyak Rp 170 miliar. Dari jumlah itu,

anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan banjir hanya Rp 15 miliar.

Di Jakarta, pelibatan warga untuk mempercepat penambahan infrastruktur penahan air hujan kembali disuarakan. Pemprov DKI didorong menyediakan insentif khusus agar banyak warga terlibat.

"Saya pribadi ingin setiap pemerintah daerah, misalkan Jakarta, memberikan insentif kepada setiap rumah yang bisa membangun sistem menahan hujan, bisa misalnya dengan dikurangi dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)," kata Firdaus Ali, Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air, dalam diskusi daring "Memuliakan Air dan Hutan Kota".

Diskusi dihelat Kemitraan Kota Hijau, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) DKI Jakarta, dan Ayo ke Taman. Turut berbicara, pengajar pada Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University, Bogor, Bambang Sulistyantara; pegiat Kemitraan Kota Hijau, Nirwono Joga; serta Niken Larasati dari IALI DKI Jakarta.

Firdaus memberi gambaran, di Jakarta ada sekitar 2,2 juta rumah tapak. Jika di setiap rumah ada sistem penahan air hujan kapasitas 1 meter kubik, berarti 2,2 juta meter kubik air tidak melimpas ke permukaan dan jadi genangan atau banjir. Volume itu setara 66,86 persen daya tampung Waduk Pluit, Jakarta Utara, seluas 60 hektar.

Teknik menahan air hujan tidak hanya dengan sumur resapan karena tidak semua area di Jakarta cocok dengan jenis infrastruktur itu. Alternatif lain adalah lubang biopori, pol-der, atau penanaman pohon.

(VAN/JOG)

Judul	PROGRAM FLPP Komitmen Hingga 2024	Tanggal	22 Maret 2021
Media	Bisnis Indonesia , Halaman 6 dan 16		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah bahkan memberikan insentif khusus bagi masyarakat agar antusias mengakses rumah layak huni. Kementerian PUPR akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1,5 juta rumah tangga, yang terdiri atas FLPP sebanyak 900.000 unit, fasilitas pembiayaan perumahan melalui BP Tapera 500.000 unit, PT SMF 50.000 unit, dan sisanya melalui BP2BT.		

| PROGRAM FLPP |

Komitmen Hingga 2024

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sampai dengan 2024 untuk memperkuat sektor perumahan di Tanah Air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah bahkan memberikan insentif khusus bagi masyarakat agar antusias mengakses rumah layak huni.

“Perumahan merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga memengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” ujarnya,

Jumat (19/3).

Pemerintah sebelumnya memberikan insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp2 miliar, dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga antara Rp2 miliar-Rp5 miliar sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 21/2021.

Selain itu, membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, a.l. program FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta program Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pemerintah menargetkan peningkatan rumah tangga

yang menempati rumah layak dari semula 56,75% menjadi sebesar 70% atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga.

“Akumulasi target sasaran melalui skenario intervensi langsung adalah sebesar 5 Juta unit rumah,” katanya.

Kementerian PUPR akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1,5 juta rumah tangga, yang terdiri atas FLPP sebanyak 900.000 unit, fasilitas pembiayaan perumahan melalui BP Tapera 500.000 unit, PT SMF 50.000 unit, dan sisanya melalui BP2BT.

Capaian subsidi perumahan (FLPP, SSB, dan BP2BT) selama 6 tahun terakhir, mulai 2015 hingga 2020, mencapai rata-rata 202.666 unit per tahun. Lalu, capaian SBUM yang merupakan komplementer SSB dan FLPP rata-rata 139.579 unit per tahun. (Yanita Petriella)